

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kabupaten Jepara

Halaman 14

## Potensi Pajak Hotel di Jepara Masih Belum Optimal Digali



DPRD KABUPATEN JEPARA

JEPARA- Komisi A dan Komisi B DPRD Jepara, Kamis (3/5) menerima audiensi para mahasiswa Unisnu (Universitas Islam Nahdlatul Ulama) Jepara. Audiensi ini dilakukan di Ruang Rapat Paripurna dengan menyertakan sekitar 100-an lebih peserta. Penelitian dari mahasiswa Unisnu mengenai pajak hotel di Jepara dipresentasikan.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi A Edi Erianto ini secara khusus memberi kesempatan kepada pihak Unisnu untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan salah seorang mahasiswanya. Mediana Ina Savitri mahasiswa akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akutansi Unisnu

membeberkan penemuan yang cukup mencengangkan terkait potensi pajak hotel di Jepara.

Mediana yang diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitiannya selama kurun waktu 2014-2016, menyebutkan bahwa potensi pajak hotel di Jepara sebenarnya sangat besar. Dari penelitiannya ia menyebutkan untuk pajak hotel potensinya mencapai Rp4 Miliar. Namun dari jumlah tersebut, rata-rata yang berhasil dipungut Pemkab Jepara hanya sekitar 10-14 % saja sepanjang 2014-2016.

Target pajak hotel di Jepara sepanjang tahun memang selalu terlampaui. Namun sesungguhnya jumlah tersebut hanya mencatat kontribusi sebesar 25,04 % saja pada PAD (Pendapatan Asli Daerah). Penerimaan pajak hotel di Jepara sepanjang 2014-2016 jumlahnya berkisar pada Rp600 juta saja. Padahal jika diteliti, berdasarkan jumlah kamar dan jumlah kunjungan wisata di Jepara, potensinya mencapai sekitar Rp4 Miliar.

"Idealnya, dari potensi yang ada itu, menurut saya, paling tidak ada 60% dari potensi yang ada harus bisa

diraih. Sehingga dari sektor pajak hotel ini bisa memberi kontribusi maksimal pada PAD Jepara," ujar Mediana Ina Savitri dihadapan, Komisi A dan Komisi B DPRD Jepara.

Pihak BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Jepara, melalui Ardhi Kurniawan menyatakan, perbedaan angka potensi yang dihitung Pemkab Jepara dan hasil penelitian itu bisa jadi karena basis penghitungannya. Penelitian Unisnu menurutnya menggunakan hitungan yang didasarkan jumlah kamar hotel yang ada di Jepara. Sedangkan pihaknya menggunakan hitungan riil tamu hotel yang ada.

Jumlah wisatawan di Jepara bisa jadi memang meningkat. Namun demikian tidak bisa semuanya diasumsikan menginap di hotel-hotel yang ada di Jepara. Hitungan yang digunakan oleh pihaknya adalah buku tamu dari masing-masing hotel. BPPKADA Jepara dalam hal ini sudah melakukan berbagai inovasi untuk bisa meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Sehingga diharapkan pendapatan dari sektor ini bisa meningkat.

"Tahun 2017 lalu target

untuk pajak hotel sudah mencapai Rp1,1 miliar. Sedangkan pada 2018 ini jumlahnya juga sudah mencapai Rp2,2 Miliar," ujar Ardhi Kurniawan memberikan tanggapan.

Anggota Komisi A, Jamal menyatakan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Unisnu. Selama ini pihaknya mengakui untuk masalah pendapatan para anggota DPRD Jepara hanya

bisa menerapkan jurus 'ramalan'. Pihaknya pernah mengajukan usulan adanya kajian mengenai potensi pendapatan ini oleh pihak independen. Namun kenyataannya hal itu belum bisa terrealisasi.

Sedangkan Ketua Komisi A, Edi Erianto menyatakan sangat berterima kasih dan akan memperhatikan masukan ini. DPRD Jepara tentu saja akan menindak-

lanjuti hal ini dengan melakukan kordinasi-kordinasi lebih intens dengan pihak terkait. Paling tidak hasil penelitian ini memberi sebuah informasi baru yang bisa dikembangkan oleh DPRD Jepara.

"Saya kira ini sebuah informasi dan masukan yang baik sekali. DPRD Jepara tentu akan menindaklanjutinya dengan baik," ujar Edi Erianto.

■ Adv